

POLITIK KETAHANAN NASIONAL: KOMPARASI DALAM REFERENDUM BREXIT 2016 DAN PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2019

Muhammad Angga Ramdhan

Abstract

The rise of nationalism values among democratic election in Western Europe had brought back the trend of classical realism in current international relations. Brexit phenomena, in which Great Britain choose to withdraw from European Union membership, is not separated from the trend. The phenomena become interesting case studies when compared to Indonesian election in 2019 where national resilience becomes the political focus. Using classical realism, this article aimed to understand why populism movement based on national resilience values was accepted in Brexit referendum but insignificant in Indonesian election. From the inquiries, this article concludes that populism movement emphasizing threats and nationalistic approach works in Great Britain due to instability caused by migrant, while Indonesia was much stable due to stronger national resilience against threats.

Key Words: Brexit, pemilu, demokrasi, Referendum, ketahanan nasional.

PENDAHULUAN

Menguatnya nilai nasionalisme dalam pemilu negara-negara demokrasi di Eropa Barat mengembalikan nuansa realisme klasik dalam hubungan antar negara saat ini. Paradigma populis di Eropa Barat, seperti kebijakan anti-migran atau proteksionisme terhadap pasar domestik menjadi landasan masyarakat menentukan pilihan politik terhadap pemerintahan yang ultra-nasionalis. Fenomena Inggris yang menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa, atau *Brexit*, tak terlepas dari tren pergeseran tersebut. Secara spesifik, dinamika *Brexit* ini menjadi studi kasus menarik bila kita membandingkan dengan wacana Pilpres 2019 Indonesia yang juga memberikan penegasan kembali untuk memperhatikan ketahanan nasional.

Prabowo Subianto, calon presiden RI 2019, menegaskan bila pertahanan negara harus ditingkatkan untuk menjaga kekayaan nasional (Al-Machmudi, 2019). Indikasi realisme klasik terlihat kembali saat Prabowo mengemukakan masalah “antek asing”, dimana ia menekankan bila TNI dan Polisi haruslah membela kepentingan negara, bukan kepentingan asing. (CNN Indonesia, 2019). Joko Widodo, selaku Presiden RI, juga menegaskan ketahanan nasional menjadi elemen penting dalam kebijakan politik luar negeri. Indonesia haruslah memperjuangkan kepentingan nasional; berdiri tegak bermartabat dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif (Utomo, 2019). Statemen-statemen politik oleh kontestan Pilpres Indonesia bila dikomparasikan dengan elite politik yang mendukung *Brexit* di Inggris, mempunyai intensitas serta tujuan sama, yakni mempertahankan integritas negara dengan memperkuat kapabilitas domestik serta mengurangi pengaruh asing. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengeksplorasi bagaimana dua negara, yakni Indonesia dan Inggris, yang meski mempunyai perbedaan lingkup geo-politik dan ancaman domestik namun sesungguhnya mengadopsi kerangka ketahanan nasional negara yang identik.

Tulisan ini terbagi dalam beberapa bagian untuk mengekplorasi konsep ketahanan nasional dalam *Brexit* dan Pilpres 2019. Pertama, tulisan ini akan mengidentifikasi melalui landasan realisme klasik apa substansi dari ketahanan nasional. Atas dasar landasan teoritis tersebut, penulis akan mengurai Brexit dan kemudian menjadi bahan komparatif terhadap perkembangan Pilpres Indonesia 2019. Dari hasil analisis komparatif tersebut, penulis menyimpulkan ketahanan nasional Indonesia lebih baik dalam menghadapi ancaman negara daripada Inggris, sehingga teknik propaganda populis yang mendiskreditkan pengaruh asing tidak terlalu efektif dalam Pilpres 2019 dibandingkan referendum Brexit pada 2016.

KETAHANAN NASIONAL: TAMENG DARI ANCAMAN ASING

Ketahanan nasional adalah instrumen penting dalam menjaga negara agar tetap bertahan dari segala ancaman dalam lingkup anarkis. Ancaman ini terderivesi dari pengalaman-pengalaman sejarah terdahulu, dimana entitas kerajaan sebelum perjanjian Westphalia selalu berkonflik demi meraih supremasi atas lawannya. Anarki sendiri adalah sebuah kondisi tanpa supremasi tunggal dalam konstelasi kekuatan (*power*) sehingga setiap entitas harus siap menghadapi berbagai dilema antara keamanan dan ancaman (Lebow, 2013; Marsheimer, 1994). Persepsi ancaman ini pula yang melandasi terjadinya peperangan. Oleh karena itu, pemikir realisme klasik seperti Thucydides mengatakan bila persaingan mendapatkan *power* selalu menyertai politik; umumnya bersifat konflikual dan juga penuh kekerasan. Pesimisme terhadap sifat manusia juga menyakinkan Thucydides bila sifat politik tidak akan berubah sehingga para pemimpin politik harus mengedepankan asas rasionalitas ketimbang moralitas (Thucydides, 1972: 78). Pemikiran Niccolo Machiavelli juga turut memperkuat argumen tentang ketahanan nasional; bahwa kebijakan harus mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kode etik (Machiavelli, 2009: 68). Atas asas rasionalitas pula, Machiavelli menekankan bahwa lebih baik menjadi adikuasa daripada dicintai musuh (Lawson, 2015: 62). Bila disimpulkan, dua pemikiran realisme klasik ini menegaskan bila hubungan antara ancaman dan ketahanan nasional tak akan lekang oleh sejarah dan akan selalu menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara.

Dasar dari realisme kemudian menjadikan negara sebagai obyek pengamanan terpenting. Ketahanan nasional sebuah negara kemudian bergantung terhadap dua faktor: kemampuan pertahanan dan besarnya ancaman yang dihadapi. Dari uraian ini, ketahanan nasional diartikan sebagai kapabilitas negara dalam menghadapi ancaman. Maka, yang menjadi isu keamanan adalah segala sumber yang mengancam ketahanan nasional dan juga kemampuan negara untuk meraih tujuan nasionalnya.

Realisme klasik menekankan kekuatan militer lawan sebagai ancaman terbesar bagi ketahanan nasional; hal ini jelas terlihat ketika

dinamika global masih berkuat di arena perang dingin. Namun, seiring berkembangnya zaman, ancaman bagi negara perlahaan-lahan mulai berevolusi. Menurut temuan ilmiah dari panel Sekretariat Jendral PBB dalam tantangan, ancaman, dan perubahan yang berjudul *A More Secure World*, ada 6 kluster ancaman yang menjadi tantangan pemerintahan negara dalam dinamika global sekarang. Ancaman tersebut berupa permasalahan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, epidemi penyakit, dan kemerosotan kualitas lingkungan; konflik antar-negara; konflik internal seperti perang sipil, genosida, dan kejahatan kemanusiaan lainnya; *weapon mass destruction* (WMD) dalam bentuk senjata nuklir, radiologi, biologis, ataupun kimiawi; dan terakhir terorisme dan kejahatan trans-nasional (Panel PBB, 2004; Williams, 2013: 9). Perkembangan ini menjadi rumit karena tiap negara mempunyai tantangan dan ancaman yang berbeda dari negara lainnya.

Bagaimana menentukan kapabilitas negara dalam menghadapi ancaman tersebut? Kenneth Waltz (1979: 153) menegaskan komponen ketahanan nasional bersifat materiil, yakni kekuatan ekonomi dan militer. Dua kekuatan ini berguna untuk mempertahankan negara, mengamankan kepentingan nasional, dan juga mengonsolidasikan kekuatan negara dalam mengatur stabilitas politik domestik; umumnya untuk menghindarkan perpecahan negara dari dalam. Dengan demikian, ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan dari kekuatan negara; bahwa kekuatan tersebut seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan negara baik menghadapi ancaman luar maupun domestik. Kindermann (1963: 27) secara spesifik menegaskan bahwa tujuan objektif dari ketahanan nasional adalah menjaga elemen penunjang eksistensi negara seperti keamanan, kekuatan, dan kesejahteraan rakyat.

Dari uraian teoritis antara realisme klasik dan ketahanan nasional, penulis memahami bahwa indikasi awal dari fenomena *Brexit* dan topik ketahanan nasional di Pilpres 2019 menjelaskan keinginan masyarakat untuk mengembalikan negara ke fungsi primalnya; yakni menjamin

keamanan dan kesejahteraan warga negaranya sendiri. Tekanan masyarakat domestik ini meningkatkan sentimen nasionalisme dan ketahanan nasional, dan proyeksi keinginan rakyat menjadikan dinamika global menuju suasana realisme klasik, dimana negara akan memperjuangkan kepentingan nasional ketimbang menjaga harmonisasi ataupun kooperasi dengan negara lain. Dengan kata lain, ketahanan nasional sebagai tameng ancaman asing menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan politisi lokal baik di Inggris ataupun Indonesia. Hipotesis ini kemudian akan menjadi petunjuk dalam mengurai Brexit pada 2016 dan Pilpres di Indonesia pada tahun 2019.

BREXIT DAN KETAHANAN NASIONAL INGGRIS

Brexit adalah fenomena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni-Eropa. Fenomena ini menimbulkan efek kejut di kalangan ilmuwan sosial, terutama dalam lingkaran akademisi hubungan internasional. Pilihan masyarakat untuk Inggris keluar dari Uni-Eropa menjadi pemenang dalam referendum bersejarah yang dicanangkan David Cameron, Perdana Menteri Inggris, pada 23 Juni 2016. Hasil referendum menyatakan 51.9 persen memilih keluar ketimbang 48.1 persen memilih tinggal (Wheeler et al, 2019). Kenyataan politik tersebut memaksa Cameron untuk mundur dari jabatan perdana menteri Inggris pada 24 Juni 2016, sehari setelah hasil referendum terlihat.

Beberapa akademisi mengidentifikasi propaganda populis yang dilakukan oleh politisi lokal menjadi penyebab masyarakat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa (Clarke et al, 2017; Daigle et al, 2017; Buckledee, 2018; Noris et al, 2019). Populis sendiri diartikan sebagai retorika politik tentang prinsip pertama politik bahwa kekuasaan negara seharusnya berada di tangan rakyat (prinsip letak kekuasaan). Namun, di saat bersamaan, retorika ini tidak menyentuh prinsip kedua dalam berpolitik, yakni tentang apa yang harus dilakukan, kebijakan apa yang harus

diimplementasikan, ataupun keputusan yang harus diambil (prinsip tujuan kekuasaan) (Noris et al, 2019: 5). Propaganda populis ini menjadi strategi efektif untuk kelompok penentang Uni-Eropa, umumnya dikenal sebagai *Euroscepticism*, dalam menghimpun dukungan dari masyarakat Inggris. Beberapa politisi Inggris, seperti Theresa May dan Boris Johnson dari partai konservatif, dan juga Nigel Farage dari partai kemerdekaan Britania Raya, mendapatkan momentum politik karena pandangan mereka yang menentang intervensi Uni Eropa (Lynch et al, 2018).

Masyarakat yang mendukung *Brexit* menilai jika relasi Inggris dengan Uni Eropa telah menggerus ketahanan nasional negara. Persepsi politik ini mengalami momentum setelah Inggris merasakan dampak dari krisis ekonomi regional pada tahun 2010 dan kedatangan arus pengungsi dari konflik timur-tengah. Studi Daigle et al (2017) menekankan bahwa kooperasi dengan Uni Eropa telah menimbulkan sentimen anti-migran dan deprivasi relatif di bidang ekonomi, terutama dari kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah ataupun kaum buruh. Dalam literatur lain, Noris et al (2019: 8) mengidentifikasi tiga komponen utama otoritarianisme dalam propaganda Brexit: (1) pentingnya keamanan (dalam bentuk ketahanan nasional) dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian, (2) pentingnya mempertahankan konformitas, atau asas kesesuaian, dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme dan tradisi konvensional, dan (3) perlunya loyalitas dan ketaatan terhadap pemimpin kuat yang bisa menjaga kelompok masyarakat beserta nilai dan adat istiadatnya. Dari sini, teridentifikasi beberapa isu yang mengancam ketahanan nasional Inggris; potensi konflik internal karena migran merebut porsi ekonomi masyarakat ‘asli’, lemahnya pemerintahan Inggris dalam menghadapi masalah terorisme, ataupun keengganan mengintegrasikan nilai dan kultur Britania Raya dengan nilai-nilai komunitas Eropa. Menangnya opsi *Brexit* juga menandakan adanya polarisasi masyarakat antara generasi pasca-perang dunia II dan generasi milenial yang memilih tetap bersama Uni Eropa.

Ancaman terorisme menjadi pemantik utama sentimen anti-migran dan juga *Euroscepticism* di Inggris. Dimulai dari rangkaian serangan teroris di Prancis pada tahun 2015 dan 2016, Inggris mendapatkan efeknya saat serangan teroris menewaskan 4 orang dan melukai 40 orang setelah seorang pengemudi menghantamkan mobilnya di Westminster Bridge (Bennhold dan Castle, 2018). Selanjutnya ada serangan teror di kota Manchester, ketika satu orang melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah konser Ariana Grande (Smith dan Chan, 2017). Rangkaian serangan terorisme Inggris pada 2017 ditutup oleh serangan tiga ekstrimis Islam di jembatan London sehingga menewaskan 8 orang dan melukai 48 orang (Daigle et al, 2017: 52); membuat Theresa May membuat statemen politik tentang ketahanan nasional menghadapi ‘ideologi biadab dari kelompok ekstremisme Islam’ (*Ibid*). Pidato politik Theresa May tersebut menaikkan sentimen anti-migran dan anti-Muslim di seluruh Britania Raya, juga menimbulkan antipati terhadap Uni Eropa yang membiarkan arus pengungsi masuk ke Eropa Barat.

Realita dalam faktor ekonomi juga mendorong kembalinya rasa nasionalisme Inggris. Pada Juli 2016, performa ekonomi Inggris berada dalam level terendah setelah resesi pada tahun 2009. Kenyataan ini membuat serikat pekerja *Southern Rail* mengadakan mogok kerja selama lima hari berturut-turut, yang terpanjang setelah tahun 1968 (Daigle et al; 51). Arus pekerja dari negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur turut meramaikan persaingan kerja di Inggris (Clarke et al, 2017: 12). Situasi yang tidak menentu dalam pasar kerja menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Inggris di bawah David Cameron tidak berjalan dengan semestinya. Persepsi ini menjadi dominan ketika berita ketidakmampuan Inggris untuk menopang program kesejahteraan rakyat, seperti akses pendidikan dan kesehatan (*National Health Services; NHS*), menjadi topik nasional. Rakyat mulai menyalahkan obligasi-obligasi Inggris ke Uni Eropa. Kemarahan rakyat Inggris meningkat setelah Palang Merah Inggris menyatakan kondisi rumah sakit dibawah naungan NHS ‘seperti dalam

krisis kemanusiaan' (Daigle et al, 2017; Campbell et al, 2017). Meskipun beberapa elite politik dan cendekiawan ekonomi, seperti David Cameron dan analis dari *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan konsekuensi *Brexit* lebih merugikan ekonomi Inggris daripada tetap menjalankan kerjasama bersama Uni Eropa, Masyarakat Inggris tidak bergeming dan tetap memilih untuk keluar.

Elemen politik pendukung Uni Eropa dan anti-Brexit, terutama dalam level elit, tidak memahami realita lapangan dalam masyarakat Inggris. Mereka tidak memahami bahwa rangkaian serangan terorisme, performa ekonomi yang rendah, serta persaingan pasar kerja pasca integrasi Eropa dan krisis ekonomi telah memarjinalisasi sebagian rakyatnya. Boleh saja beberapa akademisi menjustifikasi propaganda populis sebagai pemuas ego politik dan oportunisme; bahwa hal itu mengancam keutuhan demokrasi liberal di Inggris (Clarke et al, 2017; Daigle et al, 2017; Seidler, 2018; Buckledee, 2018; Noris et al, 2019). Namun, sejatinya propaganda populis tersebut sebagai kritik terhadap elit liberal yang menafikan ketakutan dan frustrasi mendalam yang dirasakan kelompok masyarakat tertinggal. Polarisasi dan tereduksinya kapabilitas negara dalam kooperasi Uni Eropa menyebabkan instabilitas domestik, sehingga ketahanan nasional Inggris tergerus.

Realisme klasik menjelaskan dasar kestabilan domestik berada dalam kapabilitas negara menjalankan fungsinya untuk memberi rasa aman bagi rakyat. Dalam Brexit, terlihat jika ketidakmampuan pemerintah Inggris menjalankan fungsi negara, seperti menyediakan rasa aman dan sejahtera bagi rakyatnya, menjadi impetus ketidakpercayaan masyarakat Inggris terhadap kebijakan luar negerinya. Di sini, kelompok pro-Brexit berhasil menggunakan propaganda populis untuk menyakinkan rakyat bila integrasi ke Uni Eropa telah mengikis kedaulatan Inggris, dengan memperlihatkan realita keamanan dan ekonominya. Dengan kata lain, katalis nasionalisme muncul ketika negara tidak bisa menjalankan fungsi dasarnya untuk rakyat, terutama menjaga stabilitas negara dari pengaruh asing.

PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2019 DAN KETAHANAN NASIONAL

Indonesia mempunyai ketahanan nasional dan stabilitas domestik yang lebih baik dibandingkan Inggris pasca Brexit. Meski begitu, propaganda populis mewarnai iklim Pilpres 2019. Statemen antek asing dan rumor masuknya pekerja asing menjadi perdebatan nasional, terutama menyangkut ketahanan nasional menghadapi ancaman asing; yang secara substansial sama dalam dinamika Brexit. Dalam segmen ini, penulis ini akan mengurai isu pekerja asing dan isu dalam debat calon presiden keempat dalam segmen pertahanan, keamanan dan hubungan internasional; terutama untuk menjawab mengapa pendekatan populis dan realisme klasik Prabowo tidak membawa arus nasionalisme seperti yang terjadi di Inggris.

Sejatinya isu pekerja asing menjadi topik perdebatan di politik Indonesia. Pada tahun 2018, Jokowi menerbitkan peraturan presiden tentang tenaga kerja asing yang tertuang dalam Perpres no 20 tahun 2018. Dalam perpres tersebut, ada beberapa kemudahan prosedural dalam perizinan pengunaan tenaga kerja asing (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018). Prabowo mengkritik penerbitan perpres tersebut dan mengatakan kemudahan arus pekerja asing akan merebut lapangan pekerjaan di Indonesia (Ihsanudin, 2018). Menanggapi kritikan Prabowo, Presiden Jokowi melakukan pembelaan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tidak mencapai 1 persen; dengan spesifik jumlah TKA di Indonesia berjumlah 23.000 orang (Aditya, 2018). Menurut Presiden, Pekerja asal Cina datang untuk memasang *smelter* dan turbin; sebuah spesialisasi yang tidak dimiliki oleh pekerja lokal.

Statemen presiden Jokowi diperkuat oleh Asyati (2018) dalam publikasi LIPI. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa estimasi tenaga kerja China di Indonesia berjumlah 21.300 orang, disusul oleh Jepang dengan 12.500 orang, dan Singapura 1.700 orang. Menurut Asyati, tenaga kerja Cina mengalami lonjakan sejalan dengan meningkatnya investasi Cina

di Indonesia. Tercatat, Cina telah duduk di posisi ke-3 sebagai investor terbesar dengan nilai investasi USD 2,665 juta atau 9 persen dari total investasi di Indonesia. Naik dari 2015 sebesar USD 628 juta atau 2 persen dari total investasi asing di Indonesia pada 2016 (Ibid). Lonjakan TKA Cina adalah harga yang harus dipenuhi Indonesia mengingat kebijakan investasi Cina harus menyertai tenaga kerjanya karena adanya masalah overpopulasi di lingkup domestiknya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa investasi asing bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan menaikkan performa ekonomi Indonesia. Membuka beberapa ruang untuk TKA hanyalah bayaran kecil dibanding keuntungan yang didapat Indonesia dari investasi asing (Aditya, 2018). Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri turut mendukung statemen Jokowi, dan mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan Perpres no 20 tahun 2018 karena inti aturan itu hanya mempercepat proses izin penggunaan TKA menjadi lebih cepat dan efisien, bukan menambah kuota TKA di Indonesia (Asiati, 2018).

Isu lain yang menjadi ancaman ketahanan nasional adalah pengadaan alutsista dan anggaran militer. Prabowo dalam debat capres ke-4 menyatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah. Dia menekankan kelemahan ini akibat kurangnya anggaran pertahanan dalam mereformasi persenjataan negara. Kekhawatiran Prabowo dilandasi oleh pemikiran realisme klasik Thucydides bahwa yang kuat bisa berlaku sekehendaknya, yang lemah harus menderita (*the strong do what they want, the weak do what they must*) (CNN, 2019). Lemahnya pertahanan Indonesia, menurut Prabowo, menjelaskan mengapa harta kekayaan Indonesia lari ke luar negeri, sehingga Indonesia rentan dipengaruhi asing.

Pendekatan Presiden Jokowi berbeda dengan Prabowo; dimana Ia menggelar pasukan terintegrasi ke seluruh Indonesia dan menghindari pemusatan kekuatan di Jawa (Jawasentris) dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo juga telah melakukan pemasangan radar di 19 titik vital dan mencakup 100 persen teritori

Indonesia. Dengan strategi ini, Pemerintahan Jokowi telah menganggarkan 107 triliun demi tercapainya kedaulatan Indonesia. Menurut hemat penulis, pandangan Presiden menekankan konsep realisme defensif dalam pertahanan Indonesia; dimana letak geografis dan teknologi senjata lebih cocok untuk bertahan dari ancaman musuh ketimbang mengeliminasi ancaman seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme global (Elman dan Jensen dalam Williams, 2013: 21). Strategi pertahanan Presiden Joko Widodo sejalan dengan visi menjadikan maritim Indonesia sebagai pusat ketahanan nasional; juga menjaga kekayaan Indonesia di laut. *Deployment* pasukan integrasi ke titik vital luar jawa juga menegaskan visi Presiden untuk menjaga keamanan nasional secara menyeluruh. Terutama menghadapi ancaman sel-sel teroris di seantero Indonesia. Menanggapi statemen Presiden, Prabowo mengkritisi bahwa anggaran pertahanan Indonesia masihlah rendah, hanya 0.8 persen dari GDP Indonesia.

Dalam perdebatan tentang hubungan internasional, Presiden Joko Widodo lebih menekankan *soft-power* dan multilateralisme dalam diplomasi Indonesia, sedangkan Prabowo konsisten dengan pendekatan realisme klasik. Multilateralisme menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai dalih pembangunan. Investasi asing dan kooperasi perdagangan dianggap bagian penggerak roda kesejahteraan. Prabowo, di lain pihak, menekankan bahwa diplomasi harus diimbangi kemampuan domestik dan kapabilitas negara supaya diplomasi tersebut bisa menjaga inti kepentingan nasional Indonesia.

Terlihat bahwa Prabowo menampilkan propaganda populis dengan mempertanyakan kebijakan multilateralisme presiden Joko Widodo menghadapi ancaman pengaruh asing. Selain itu, Prabowo juga mempertanyakan kapabilitas negara dengan mengklaim lemahnya pertahanan negara. Namun, topik populis dengan narasi realisme klasik tidak menimbulkan gejolak nasionalisme melawan pengaruh asing.

Kalahnya Prabowo dalam Pilpres 2019 menjadi bukti ketidakefektifan teknik propaganda Brexit di Indonesia.

Penulis mengemukakan setidaknya ada beberapa faktor penjelasan. Yang pertama, ancaman asing di Indonesia tidak mempunyai wujud nyata di masyarakat Indonesia. Persaingan antara TKA dan pekerja lokal di kancah domestik tidak pernah terlihat. Yang kedua, pengaruh ASEAN dan Cina dalam perpolitikan domestik pun tidak menganggu ketahanan nasional. Karena pada dasarnya, negara-negara di ASEAN dan sekitarnya menghargai prinsip kedaulatan negara dan enggan untuk mengintervensi negara lain, apalagi mitra strategis seperti Indonesia (Hadiwinata dalam Neuhauser, 2017: 137). Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi di Inggris; di mana ancaman migran dan obligasi Uni Eropa menimbulkan ketakutan nyata serta instabilitas di masyarakatnya.

Dalam mengidentifikasi ancaman Indonesia, penulis berpendapat bahwa ancaman nyata yang meresahkan rasa aman masyarakat Indonesia datang dari dalam ketimbang dari luar; seperti ancaman radikalisme dan separatis yang mengancam keutuhan negara. Dari uraian ini, ketahanan nasional Indonesia harus difokuskan ke dalam, terutama dalam membendung pengaruh sel-sel ISIS, menjaga kedaulatan laut negara dari nelayan-nelayan ilegal, dan juga kelompok separatis di provinsi Papua dan Papua Barat. Ancaman luar yang meresahkan sebetulnya berada di PBB, dimana kelompok diaspora Papua, atau lebih dikenal *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), mulai berhasil menginternasionalisasikan isu-isu social di Papua dan menarik perhatian negara Melanesia seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon (Rumkabu, 2017). Namun ancaman ULMWP masih terbendung karena kedaulatan Indonesia di Papua sudah diakui oleh dunia internasional. (Saltford, 2003).

Ketahanan nasional Indonesia pun sudah teruji dalam menghadapi ancaman dari dalam. Tito Karnavian (2017) menjelaskan bahwa detasemen 88 dibawah kepolisian RI mempunyai teknik modern dalam menghadapi serangan terorisme, yakni dalam bentuk sistem deteksi dini dan

penyelidikan berbasis saintifik. Selain itu, anggota detasemen 88 juga mendapatkan pelatihan ekstensif. Karnavian menegaskan bahwa semenjak 2002, detasemen 88 sudah menangkap dan menghukum pelaku teror dalam pengadilan hukum. Menghadapi insurgensi di Papua, Karnavian menggunakan inovasi gabungan penegakan hukum keras (*hard law-enforcement*) dengan memperhatikan batas-batas hukum nasional, asas-asas hak asasi manusia, dan hukum adat (*soft law-enforcement*) dengan hasil yang memuaskan (Ibid: 12) Menghadapi ancaman luar, seperti *illegal fishing*, Indonesia di bawah arahan menteri Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 516 kapal illegal, sebagian dari negara asing (Muthiariny, 2019). Kebijakan tersebut telah meningkatkan ekspor sebesar 45.9 persen, dengan rincian dari 659,950 ton atau setara 58.9 trilliun pada 2015, menjadi 955,880 ton atau setara 72 triliun pada 2018. (Ibid). Pengaruh ULMWP di kawasan Pasifik dan arena PBB dalam internasionalisasi isu Papua Barat pun masih bisa dibendung oleh korps diplomatik Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Rumkabu, 2017). Dengan demikian, propaganda populis Prabowo bernuansa realisme klasik tidak efektif dalam memenangkan pilpres 2019 karena Indonesia mempunyai ketahanan nasional yang lebih baik dibandingkan Inggris.

KESIMPULAN

Penemuan dari tulisan ini menegaskan bahwa strategi populis mengenai ketahanan nasional untuk menaikkan nilai nasionalisme tidak efektif bila ancaman tersebut masih teratas oleh kapabilitas negara. Penemuan ini kemudian menegaskan mengapa politisi pro-Brexit mendapatkan simpati rakyat sedangkan Prabowo Subianto tidak mendapatkan hasil yang sama di Pilpres Indonesia 2019. Untuk mencapai penemuan tersebut, tulisan ini telah mengurai berbagai aspek ketahanan nasional dari sudut pandang realisme klasik, lalu menjelaskan mengapa sudut pandang tersebut relevan dalam memahami strategi populis dalam referendum Brexit dan Pilpres 2019, namun konklusinya berbeda.

Penulis berpendapat bahwa posisi ancaman yang berbeda di kedua negara berkorelasi dengan perbedaan hasil tersebut. Ancaman asing terasa nyata bagi rakyat Inggris, berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru terancam dari dalam oleh perpecahan internal.

Meski begitu, Indonesia perlu merespon lebih baik menghadapi resiko interdependensi dengan Cina. Hal ini karena dinamika global selalu menghasilkan ketidakpastian dalam perpolitikan internasional. Ketahanan nasional haruslah dipikirkan baik-baik karena kemungkinan Indonesia mengalami instabilitas karena pengaruh asing selalu terbuka. Fenomena Brexit haruslah dijadikan tolak ukur kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi multilateralisme dan interdepensi dengan Cina ataupun investasi asing lainnya.

REFERENSI

- Aditya, Arya, 2018. *Pembelaan Jokowi Soal Tuduhan Antek Asing dan Pekerja China*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180808105322-4-27514/pembelaan-jokowi-soal-tuduhan-antek-asing-dan-pekerja-china>
- Al-Machmudi, Muhammad Iqbal. 2019. *Pertahanan Nasional Menjadi Skala Prioritas Prabowo*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/226588-pertahanan-nasional-menjadi-skala-prioritas-prabowo>
- Asiati, Devi. 2018. *Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal Cina*. Publikasi LIPI. <http://lipi.go.id/lipimedia/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china/20546>
- Bennhold, Katrin. Stephen Castle. 2017. *Deadly Attack Near U.K Parliament; Car Plows Victim in Westminster Bridge*. New York Times. <https://www.nytimes.com/2017/03/22/world/europe/uk-westminster-parliament-shooting.html>
- Buckledee, Steve. 2018. *The Language of Brexit: How Britain talked its way out of The European Union*. London: Bloomsbury Press
- Campbell, Denis. Steven Morris, Sarah Marsh. 2017. *NHS Faces Humanitarian Crisis as Demand Rises, British Red Cross Warns*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/society/2017/jan/06/nhs-faces-humanitarian-crisis-rising-demand-british-red-cross>
- Clarke, Harold D. Matthew Goodwin, Paul Whiteley. 2017. *Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union*. New York, NY: Cambridge University Press.
- CNN Indonesia. 2019. *Aksi Gebrak Podium Prabowo Saat Bicara Antek Asing di Yogyakarta*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190409064003-32-384455/aksi-gebrak-podium-prabowo-saat-bicara-antek-asing-di-yogyakarta>
- CNN Indonesia. 2019. *Debat Capres Jokowi-Prabowo Soal Pertahanan, Keamanan & Hubungan Internasional*. YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=-guyUY0NVzI>
- Daigle, Delton T. Josephine Neulen, Austin Hofeman. 2017. *Populism, Nativism, and Economic Uncertainty: Playing the Blame Game in the*

2017 British, French, and German Election. London: Palgrave Macmillan.

Dunne, Tim. Milja Kurki, Steve Smith. 2013. *International Relations Theories*. London: Routledge.

Elman, Colin. Michael A. Jensen. *Realisms*, dalam Williams, Paul D (ed). 2013. *Security Studies: An Introduction*. London: Routledge. Hal. 15-30.

Hadiwinata, Bob S. *Humanitarian Intervention: Conceptual Debates in the West and in Southeast Asia*, dalam Neuhaseur, Christian dan Christoph Suck. 2017. *Military Intervention*. Baden-Baden: Nomos. Hal 129-148.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. *Inilah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-20-tahun-2018-tentang-penggunaan-tenaga-kerja-asing/>

Ihsanudin. *Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?*. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/01/17535971/prabowo-kalau-buka-pintu-untuk-tka-rakyat-kita-kerja-apa>

Karnavian, Muhammad Tito. 2017. *The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia*. Counter Terrorist Trends and Analyses. Vol 9 no 9. Hal 8-13.

Kindermann, Gottfried-Karl. 1986. *Internationale Politik in Theorie, Analyse und Praxis*, dalam Kindermann, Gottfried-Karl (ed.) *Grundelemente der Weltpolitik – Eine Einführung*, 3rd expanded edn. Munich: Piper. pp. 59 – 105

Lawson, Stephanie. 2015. *Contending Approaches to World Politics*. Cambridge: Polity Press.

Lebow, Richard Ned. *Classical Realism*, dalam Dunne, Tim. Milja Kurki, dan Steve Smith. *International Relations Theories*. 2013. London: Routledge.

Lynch, Phillip. Richard Whitaker. 2018. *All Brexiteers now? Brexit, the Conservatives and party change*. British Politics, vol 13, issue 1, 31–47. <https://doi.org/10.1057/s41293-017-0064-6>.

Machiavelli, Niccolo. 2009. *The Prince*, trans. W.K Marriot, ed. Randy Dillion. Plano, TX: Veroglyphic

Mearsheimer, John J. 1994. *The False Promise of International Institutions*. International Security, vol. 19 no. 3: 5–49

Muthiariny, Dewi E. Markus Wisnu Murti (ed). 2019. *Susi Pudjiastuti: Illegal Fishing Eradication Boost Fishing Stock*. Tempo. <https://en.tempo.co/read/1226420/susi-pudjiastuti-illegal-fishing-eradication-boosts-fish-stock>

Noris, Pippa. Ronald Inglehart. 2019. *Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism*. New York, NY: Cambridge University Press.

Rumkabu, Elvira. *ULMWP: Self-Determination, Diplomasi Pasifik dan Dinamika Internasional*, dalam *Oase Gagasan Papua*. 2017. Jakarta: Imparsial. Hal 51-127.

Salford, John. 2003. *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua: Anatomy of Betrayal*. London: RoutledgeCourzon.

Seidler, Victory J. 2018. *Making Sense of Brexit: Democracy, Europe, and Uncertain Futures*. Bristol: Policy Press.

Smith, Rory. Sawell Chan. 2017. *Ariana Grande Manchester Concert Ends in Explosion, Panic and Death*. New York Times. <https://www.nytimes.com/2017/05/22/world/europe/ariana-grande-manchester-police.html>

Thucydides. 1972. *History of the Peloponnesian War*, Trans. Rex Warner. London: Penguin.

UN Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change. 2004. *A More Secure World: Our Shared Responsibility*. New York: UN

Utomo, Ardi Priyatno. 2019. *Dalam Hubungan Internasional, Jokowi Sebut Indonesia Harus Tegak Bermartabat*, Kompas Internasional. <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/30/20590861/dalam-hubungan-internasional-jokowi-sebut-indonesia-harus-tegak>.

Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. New York: Random House.

Wheeler, Brian, Paul Seddon, Richard Morris. 2019. *Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU*. BBC. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>

Williams, Paul D (ed). 2013. *Security Studies: An Introduction*. London: Routledge